

SELASA, 4 SEPTEMBER 2018

MENYOAL KUALITAS PENDIDIKAN DI INDONESIA

Pendidikan di Indonesia sedang mengalami distorsi, baik dari segi proses, mutu, maupun pencapaian kualitas. Dari segi proses, pelaksanaan pendidikan tidak relevan dengan evaluasi kemajuan yang dicapai. Dari segi mutu, terjadi kelemahan perencanaan pendidikan dan kesenjangan lulusan dengan kebutuhan masyarakat. Sementara dari segi kualitas, terjadi distorsi karena kurangnya analisis menyeluruh dalam menerapkan sebuah kebijakan pendidikan.

Bank Dunia (World Bank) menyebut bahwa kualitas pendidikan di Indonesia masih rendah, meski perluasan akses pendidikan untuk masyarakat dianggap sudah meningkat cukup signifikan. Indonesia sendiri telah mencanangkan program reformasi pendidikan untuk membenahi kualitas sektor ini selama 15 tahun sejak 2002.

Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo Chaves mengatakan kualitas pendidikan yang rendah tercermin dari peringkat Indonesia yang masih berada di posisi tertinggi dari negara-negara tetangga. Indikator peringkat kualitas pendidikan ini tercermin dalam jumlah kasus buta huruf. Misalnya, 55 persen anak usia 15 tahun di Indonesia secara fungsional buta huruf, dibandingkan kurang dari 10 persen di Vietnam. (Kompas, 7/6/2018).

Tantangan Pemerintah

Kualitas pendidikan di Tanah Air masih menjadi tantangan bagi pemerintah. Padahal, dari sisi anggaran, dana untuk pendidikan telah mencapai Rp 444 triliun atau sekitar 20 persen dari total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018. Itu artinya, permasalahan pendidikan tak bisa diselesaikan dari sisi anggaran saja. Namun, harus pula dibahas secara teknis dengan tiga kementerian yang berkaitan langsung, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), dan Kementerian Agama (Kemenag).

Selain itu, daerah juga perlu ikut sebagai keharusan untuk membayar pendidikan penuh, misalnya terhadap gaji dan tunjangan guru. Sedangkan, khusus untuk kualitas pendidikan, bisa kita katakan saat ini yang menjadi tantangan di berbagai negara adalah persoalan manajemen dan efektivitas belajar anak di sekolah. Begitupun dengan kurikulum dan text book, itu penting agar negara bisa menyiapkan strategi dalam membangun SDM dengan tantangan yang ada, misalnya industrialisasi, teknologi yang berubah, dan keterbukaan informasi.

Sementara dari sisi akses pen-

didikan, jumlah siswa yang kini mampu bersekolah meningkat cukup signifikan. Adapun peningkatan akses ini dilakukan dengan meningkatkan pembiayaan, peningkatan partisipasi para pelaku lokal dalam tata kelola pendidikan, peningkatan akuntabilitas dan kualitas guru, hingga memastikan kesiapan siswa.

Sayangnya, hasil tersebut belum bisa memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. Saat ini yang kita rasakan adalah adanya ketertinggalan di dalam mutu pendidikan. Hasil itu diperoleh setelah kita membandingkannya dengan negara lain. Pendidikan memang telah menjadi penopang dalam meningkatkan sumber daya manusia Indonesia untuk pembangunan bangsa.

Menurut Tilaar (1991: 56), bukan saja bagi para profesional, juga bagi masyarakat luas pun terdapat suatu gerakan yang menginginkan adanya perubahan sekarang juga dalam hal usaha peningkatan mutu atau mutu pendidikan. Oleh karena itu, kita seharusnya dapat meningkatkan sumber daya manusia Indonesia yang tidak kalah bersaing dengan sumber daya manusia di negara-negara lain.

Solusi Peningkatan Kualitas Pendidikan

Saat ini yang menjadi tantangan yang masih belum terselesaikan yang tidak kalah pen-



Oleh:

Asri Kusuma Dewanti

PENGAJAR FKIP
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

tingnya adalah tidak meratanya akses pendidikan itu alias masih ada ketimpangan. Supaya tidak terjadi ketimpangan dan kualitas pendidikan di negeri ini membaik, Berikut ini ada beberapa solusi dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di negeri ini diantaranya.

Pertama, demi peningkatan kualitas pendidikan pemerintah perlu ada perluasan akses pendidikan yang lebih merata dan sesuai dengan standar pendidikan internasional, baik secara kurikulum maupun praktik. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan kriteria kualifikasi guru hingga meluncurkan kampanye perbaikan kualitas pendidikan.

Kedua, dilihat dari sisi pen-

gaturan anggaran pendidikan, pemerintah dinilai perlu memberikan anggaran berdasarkan kinerja dan kualitas pendidikan yang bisa dibangun daerah.

Ketiga, menghadirkan upaya pemerintah agar melengkapi mekanisme pembiayaan yang ada untuk pendidikan dengan transfer yang targetnya ditetapkan dengan baik dan berbasis kinerja untuk sekolah dan kabupaten tertinggal.

Keempat, aktor-aktor pendidikan harus menyadari peran dan identitas masing-masing. Pemerintah, misalnya, bertanggung jawab untuk melaksanakan pendidikan yang hakiki sehingga bisa mengatasi krisis dan problematika bangsa. Caranya adalah dengan melepaskan intervensi kepentingan yang berbau ekonomis dan politis. Pemerintah bersama dengan masyarakat juga harus senantiasa mengawasi proses pendidikan supaya penyelewengan-penyelewengan dana tidak terjadi lagi.

Selanjutnya, seorang pendidik bertanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya dalam membimbing peserta didik dan mengubah pola pikir mereka ke arah yang lebih baik. Pendidikan karakter dan anti konsumerisme harus ditekankan sejak dini. Sementara murid bertanggung jawab melaksanakan tugasnya sebagai penerus estafet

bangsa dengan belajar sungguh-sungguh. Belajar bukan sekadar untuk memperoleh nilai dan ijazah, melainkan untuk memperoleh kompetensi intelektual yang tinggi sehingga dapat melakukan pengabdian kepada masyarakat.

Apabila aktor-aktor pendidikan utama itu mau melaksanakan praktik-praktik sosial yang baru dengan mengesampingkan pendidikan sebagai komoditas yang menguntungkan, kebiasaan buruk yang telah lama kita praktikkan sedikit demi sedikit akan terkikis dan dapat melahirkan harapan baru dalam dunia pendidikan kita.

Melalui keempat solusi tersebut, jika diterapkan paling tidak sudah bisa membantu meningkatkan kualitas pendidikan di tanah ini. Sebab, bagaimanapun juga pendidikan seharusnya menempati posisi strategis dalam kehidupan sebuah bangsa. Soekarno (1963) dalam tulisannya "Menjadi Guru di Kala

Kebangunan" berkata. "Sebuah bangsa hanya dapat mengajarkan apa yang terkandung dalam jiwanya sendiri. Bangsa budak belian akan mendidik mental anaknya ke dalam re penghambaan dan penjiwaan Bangsa orang merdeka akan mengajarkan anak-anaknya menjadi orang-orang merdeka

Akhirnya, dapat kita simpulkan bahwa untuk mencapai sebuah kualitas pendidikan setidaknya harus mencakup aspek-aspek akademis, jasmaniah, mental, dan moralitas. Ilmu pengetahuan akademis diajarkan tidak cukupi tanpa adanya pembentukan sikap (mental), dan tiganya tidak lengkap tanpa adanya nilai-nilai agama sehingga melahirkan manusia berakhlak mulia. Nilai-nilai positif inilah yang ada dalam masyarakat Indonesia dan dapat kita manfaatkan untuk kepentingan bersama. Termasuk dalam meningkatkan kualitas pendidikan. (*)

INFO PENTING PENGIRIMAN OPINI

1. Topik masalah aktual di Malang Raya dan nasional
2. Panjang tulisan sekitar 850 kata.
3. Sertakan foto penulis, dalam posisi santai, bukan pas foto.
4. Nama dan identitas penulis ditulis di bawah judul opini.
5. Email: redaksi@malang-post.com
Tulis Judul Opini dalam Subject Email